

Judul : Suhartoyo tantang publik kritik MK setiap saat
Tanggal : Jumat, 10 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Suhartoyo Tantang Publik Kritik MK Setiap Saat

KETUA terpilih Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo membuka ruang bagi publik untuk mengawal lembaganya. Seluruh masukan dan kritik dari masyarakat dinilai penting agar MK kian dewasa.

"Kalau memang ke depan ada yang tidak baik, tidak apa-apa kami dikritik berdua (dengan Wakil Ketua MK Saldi Isra)," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua dan Saldi Isra selaku wakil ketua melalui rapat pleno sembilan hakim konstitusi, kemarin. Mereka akan dilantik pada Senin (13/11).

Suhartoyo mengatakan pengawasan setiap saat dari publik penting agar MK senanti rasa memiliki bahan evaluasi. "Jadi, (MK) jangan dibiarkan. Kalau adik adik (insan pers) membiarkan, sama juga membiarkan embrio jadi besar dan fatal," tuturnya.

Suhartoyo menggantikan

Anwar Usman yang dicopot dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena terbukti melanggar etik dalam pengambilan Putusan Perkara No 90/PUU-XXI/2023. MKMK juga memberikan sanksi teguran lisan kepada Suhartoyo bersama lima hakim MK.

Mereka disebut melakukan pelanggaran ringan kode etik dalam penanganan Perkara 90 tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu. Putusan 90 meloloskan keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meyakini Suhartoyo mampu memperbaiki citra MK dan bisa mengembalikan kepercayaan publik, terutama menjelang Pemilu 2024.

Boyamin menyebut dari pengalamannya mengikuti

Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (Kamis, 9 November 2023)



- Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2023-2028.
- Suhartoyo menggantikan posisi Anwar Usman yang dicopot oleh Majelis Kehormatan MK.
- Pada sidang MK, 7 November 2023, Suhartoyo termasuk satu dari enam hakim MK yang terbukti secara bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dr Suhartoyo SH, MH

Lahir: Sleman, 15 November 1959
(64 tahun)

Karier

- Ketua PN Praya, NTB (2004)
- Wakil Ketua PN Pontianak, Kalimantan Barat (2009)
- Ketua PN Pontianak, Kalimantan Barat (2010)
- Wakil Ketua PN Jakarta Timur, DKI Jakarta (2011)
- Ketua PN Jakarta Selatan, DKI Jakarta (2011)
- Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali (2011)
- Hakim Konstitusi (2015-2019)
- Ketua Mahkamah Konstitusi (2023-2028)

Pendidikan

- S-1 Universitas Islam Indonesia (1983)
- S-2 Universitas Tarumanagara (2003)
- S-3 Universitas Jayabaya (2014)

Total Harta Kekayaan
(LHKPN 2022)
Rp14.748.971.796

Sumber: MK/Litbang MK/Foto: MI

sidang di MK, Suhartoyo merupakan sosok yang kritis, cermat, dan tegas. Ia berharap di bawah kepemimpinan Suhartoyo, MK akan menghasilkan putusan-putusan yang bermartabat dan berkeadilan.

Di sisi lain, Anwar Usman kembali didesak mundur dari MK, bukan sekadar dicopot dari jabatan ketua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan keberadaan An-

war yang jelas-jelas terbukti melakukan pelanggaran berat etik, tetapi masih berstatus hakim, akan terus menjadi halangan bagi pemulihan martabat dan independensi MK.

"Meski MKMK menanggalkan jabatan Anwar sebagai ketua hakim dan tidak boleh terlibat dalam perkara perselisihan hasil pemilu/pilpres, sesungguhnya ia telah kehilangan legitimasi etis untuk memeriksa atau mengadili per-

kara apa pun," ucap Usman.

Usman pun mendesak MK segera menyidangkan permohonan uji formal atas Putusan No 90 dan permohonan uji materi pasal tentang batas usia capres dan cawapres yang telah mendapat tafsiran baru.

Selanjutnya, DPR didorong mengajukan hak interpelasi dan hak angket demi mengungkap adanya intervensi penyelenggara negara di MK. (Teo/Van/Ykb/X-10)